

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengamanatkan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan baik pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal maupun pendidikan informal. Salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan suatu negara tergantung dari kualitas guru. Pemenuhan kualitas guru profesional dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas akademik, kompetensi, serta kualifikasi sebagai seorang pendidik (Kasmiati, 2019). Pernyataan tersebut termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menerangkan guru adalah pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Kemendikbud, 2014).

Kata profesional sendiri memiliki arti sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Selanjutnya, kualifikasi calon guru harus memenuhi syarat sebagai berikut; lulusan program Sarjana (S-1) atau program Diploma 4 (D-4), serta memiliki sertifikat kompetensi sebagai bukti formal pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki. Pada realita yang terlihat, lulusan sarjana pendidikan semakin banyak dihasilkan oleh LPTK (Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan), namun kualitas lulusan sarjana pendidikan tersebut tidak diikuti dengan pemenuhan kompetensi yang dibutuhkan sebagai seorang guru profesional. Oleh karena itu, peneliti melakukan observasi ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) terkait strategi perencanaan dalam upaya memenuhi kebutuhan guru yang berkompeten secara nasional.

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbudristek yakni Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., menyatakan bahwa Indonesia akan kekurangan sekitar 1,3 juta guru hingga tahun 2024. Namun, sejak tahun 2019 dan 2021, pemerintah telah melaksanakan perekrutan PPPK sehingga kebutuhan guru 2023 mencapai 960 ribu. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih kekurangan guru walaupun lulusan dari LPTK sudah terlalu banyak, namun guru yang benar-benar siap mengajar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan amatlah kurang.

Demi memenuhi kebutuhan guru sekaligus menyaring kompetensi guru yang memiliki kualitas baik, maka diselenggarakanlah rekrutmen pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K/PPPK) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk jabatan fungsional dengan sistem seleksi yang ketat. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam tentang analisis kebijakan perencanaan kebutuhan guru.

Kebutuhan yang dimaksud disini adalah konsep yang sering digunakan dalam istilah ilmu ekonomi yang telah banyak dikembangkan untuk berbagai keperluan dalam kegiatan manusia pada konteks yang berbeda. Konsep kebutuhan dalam ilmu ekonomi disebut "*demand*". Kebutuhan merupakan suatu kondisi yang mengharapkan adanya pemenuhan terhadap sesuatu hal yang diperlukan. Tidak terpenuhinya suatu kebutuhan akan mengakibatkan adanya ketidakseimbangan atau kesenjangan. Dalam pandangan lain Meirawan (2002) menyatakan kebutuhan adalah suatu istilah dalam perencanaan yang memperlihatkan "*gap*" (kesenjangan) antara hasil yang dicapai sampai saat sekarang dengan hasil yang diinginkan. Untuk memperbaiki hasil yang diperoleh sekarang sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik, maka diperlukan adanya suatu tambahan, tambahan itulah yang dimaksud dengan kebutuhan. Lebih lanjut Sunandar (2006) menyatakan bahwa dalam melakukan analisis kebutuhan tidak boleh diabaikan atau dilakukan secara asal sehingga dibutuhkan pertimbangan yang matang dan berbasis data. Namun nyatanya, Di Indonesia seringkali kebutuhan yang diperlukan untuk memperbaiki hasil tidak dianalisis secara akurat, tetapi hanya didasarkan pada dugaan atau perkiraan. Bila hal ini terjadi, maka proses perencanaan bisa menghasilkan sebuah keputusan dari informasi yang kurang tepat, sehingga keputusan tersebut tidak berguna.

Perencanaan dalam pendidikan berkaitan dengan banyak hal, salah satunya adalah perencanaan terkait dengan kebutuhan guru. Perencanaan kebutuhan guru memegang peranan penting dan strategis dalam pendidikan nasional. Pengelolaan guru tanpa adanya perencanaan kebutuhan guru dapat menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap kualitas pendidikan. Tidak seimbangnya antara jumlah guru dengan jumlah siswa dapat menimbulkan ketimpangan kualitas pendidikan. Perencanaan kebutuhan guru dilakukan agar rasio guru dengan siswa dapat seimbang, sehingga kualitas pendidikan dapat terjaga dan pada akhirnya dapat mencapai tujuan pendidikan nasional (Riswandi, 2017).

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Oleh karena itu, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu terutama warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Salah satu kebutuhan dalam pendidikan dasar yang harus dipenuhi adalah tersedianya jumlah guru pada jenjang pendidikan. Hal ini dikarenakan guru merupakan faktor utama terselenggaranya proses belajar mengajar di dalam kelas.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI) harus tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan. Guru yang dimaksud adalah guru kelas, sehingga jumlah tersebut belum termasuk guru bidang studi, yaitu guru

agama dan guru penjaskes. Kriteria ini merupakan standar pelayanan minimal pendidikan dasar di kabupaten/kota yang harus dipenuhi dalam pengelolaan pendidikan. Sesuai dengan kebijakan tersebut, maka setiap Sekolah Dasar (SD) harus memiliki guru kelas dan guru bidang studi yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah rombongan belajar yang ada pada sekolah tersebut.

Untuk mengetahui kebutuhan guru kelas dan guru bidang studi yang sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek, maka perlu dilakukan analisis perencanaan kebutuhan guru. Salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam menghitung kebutuhan guru dalam perencanaan pendidikan yaitu mengetahui kapasitas jumlah siswa dalam suatu kelas yang dapat mempengaruhi tingkat efektifitas proses pembelajaran. Kinerja guru akan berjalan baik jika beban kerjanya terpenuhi atau dengan kata lain, guru di sekolah itu ideal dalam perhitungan jumlah orang dan jam kerja. Hal ini sejalan dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2010 tentang pemenuhan kebutuhan, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kesejahteraan guru, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar mengamanatkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan penyelenggara pendidikan sesuai kewenangannya melakukan pemenuhan kebutuhan guru yang dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan guru dengan mempertimbangkan 1) rasio dan peserta didik, 2) sebaran guru, dan 3) proyeksi pemenuhan beban kerja guru paling sedikit 24 jam tatap muka dalam 1 minggu.

Salah satu wilayah yang diidentifikasi perlu melakukan perencanaan kebutuhan guru adalah Kabupaten Pringsewu. Pringsewu adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung yang sampai saat ini belum ada data dan informasi terkait penelitian tentang perencanaan kebutuhan guru di kabupaten tersebut. Oleh karena itu, kegiatan penelitian tentang perencanaan ini menjadi penting khususnya di Pringsewu yang memang belum atau tidak memiliki program penelitian tentang perencanaan kebutuhan guru sehingga hasil penelitian ini akan memberikan data dan informasi bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu untuk menjadi bagian dari proses keperluan kebijakan jika dibutuhkan.

Berdasarkan data BPS (2020), penduduk kabupaten Pringsewu tercatat 406.823 jiwa. Dari jumlah tersebut, terdapat penduduk usia sekolah dengan jumlah

93.936 jiwa dan penduduk usia sekolah dasar sebanyak 45.105 jiwa. Pada tahun 2021/2022 Kabupaten Pringsewu memiliki 301 Sekolah Dasar (SD dan MI) yang tersebar di 9 kecamatan, baik sekolah negeri maupun swasta yang dikelola oleh pihak swasta yaitu terdiri dari 265 SD (negeri dan swasta) serta 99 MI (negeri dan swasta). Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pembahasan mengenai pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Dasar (SD) Negeri.

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi yang telah dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu menunjukkan bahwa Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Pringsewu berjumlah 252 sekolah terdiri dari 1.755 rombongan belajar dan jumlah peserta didik mencapai 35.279 siswa. Jumlah sekolah tersebut sangat berkaitan dengan jumlah guru. Suatu wilayah dengan jumlah rombongan belajar yang banyak, maka akan membutuhkan jumlah guru yang banyak pula, karena setiap rombel harus memiliki satu guru kelas.

Kemudian, berdasarkan data yang diperoleh dari studi dokumentasi juga menyatakan bahwa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kabupaten Pringsewu memiliki 2.668 guru, dengan perincian guru kelas sebanyak 1.469 orang, guru agama sebanyak 175 orang dan guru penjas sebanyak 185 orang serta jumlah guru non-ASN (honor sekolah) sebanyak 839 orang. Perbandingan jumlah rombongan belajar dan siswa dari data tersebut sudah dipastikan bahwa kabupaten pringsewu masih harus melakukan pemenuhan kebutuhan guru. Kebutuhan guru inipun akan terus bertambah karena setiap tahunnya terdapat guru yang memasuki masa pensiun atau purna tugas. Kondisi ini memerlukan adanya perencanaan kebutuhan guru yang mana jika tidak dilakukan perencanaan secara akurat maka proses belajar dan mengajar di dalam kelas tidak akan berjalan secara efektif dan efisien.

Oleh karena itu, perencanaan kebutuhan guru khususnya Sekolah Dasar (SD) Negeri sangatlah penting untuk dilakukan, karena peran guru dibatasi oleh masa kerja yang akan berakhir pada masa pensiun, sementara jumlah penduduk usia sekolah dasar akan terus meningkat. Jika perencanaan kebutuhan guru tidak dilakukan, maka akan terjadi beban kerja yang berlebih dan pelayanan terhadap siswa tidak akan maksimal. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis perencanaan kebutuhan guru sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul

penelitian tentang Analisis Kebijakan Perencanaan Kebutuhan Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.

B. Fokus Dan SubFokus Penelitian

Keseluruhan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada “ANALISIS KEBIJAKAN PERENCANAAN KEBUTUHAN GURU SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DI KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG”. Maka, peneliti dapat merumuskan subfokus sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan perencanaan kebutuhan guru Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.
2. Proyeksi kebijakan perencanaan kebutuhan guru Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.
3. Rekomendasi kebijakan perencanaan kebutuhan guru Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.
4. Pemantauan kebijakan perencanaan kebutuhan guru Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.
5. Evaluasi realisasi kebijakan perencanaan kebutuhan guru Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.

C. Pertanyaan Penelitian

Uraian yang telah dikemukakan dalam fokus dan subfokus penelitian membuat peneliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perumusan kebijakan perencanaan kebutuhan guru Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung?
2. Bagaimanakah proyeksi kebijakan perencanaan kebutuhan guru Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung?
3. Bagaimanakah rekomendasi kebijakan perencanaan kebutuhan guru Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung?
4. Bagaimanakah pemantauan kebijakan perencanaan kebutuhan guru Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung?
5. Bagaimanakah evaluasi realisasi kebijakan perencanaan kebutuhan guru Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, fokus dan sub-fokus penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk:

1. Merumuskan kebijakan perencanaan kebutuhan guru Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.
2. Memproyeksikan kebijakan perencanaan kebutuhan guru Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.
3. Merekomendasikan kebijakan perencanaan kebutuhan guru Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.
4. Memantau kebijakan perencanaan kebutuhan guru Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.
5. Mengevaluasi realisasi kebijakan perencanaan kebutuhan guru Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.

E. Manfaat Penelitian

Rangkaian penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam hal ini Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan kebutuhan yang mendekati real time sehingga ketersediaan guru (*teacher supply*) dengan pemenuhan kebutuhan guru (*teacher demand*) dapat tersinkronisasi dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan terkhusus dalam konsep analisis dan perencanaan kebutuhan guru yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta penelitian ini diharapkan mampu melahirkan penelitian-penelitian lainnya guna menyempurnakan atau memperbaiki kebijakan yang akan datang mengenai analisis perencanaan kebutuhan guru secara merata dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.

2. Manfaat Praktis

Sebagai hasil dari sebuah penelitian, manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan mampu memberi wawasan mendalam bagi pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam kegiatan perencanaan kebutuhan guru, di antaranya:

a. Bagi Kemdikbudristek:

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan perencanaan kebutuhan guru sesuai dengan pemenuhan kebutuhan guru di masa mendatang.

b. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota:

Dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi dalam melakukan kegiatan perencanaan kebutuhan guru sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Sehingga kebutuhan yang telah ditetapkan dapat teroptimalisasi secara maksimal di masa mendatang.

c. Bagi Masyarakat:

Dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dalam menggali informasi dan sumber data serta pengetahuan yang berguna dalam kepustakaan analisis perencanaan kebutuhan guru kelas Sekolah Dasar di wilayah kabupaten/kota.

F. *State of The Art*

Berdasarkan hasil riset dari beberapa jurnal penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini dan berikut beberapa penelitian yang dijadikan sebagai pembanding dengan tujuan untuk mengetahui kesamaan dan perbedaan peneliti dengan peneliti sebelumnya sehingga peneliti dapat mengetahui nilai kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan. Penelitian pertama oleh Sunandar (2006) dengan judul “Analisis Perencanaan Kebutuhan Guru”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan guru seperti kekurangan guru, pemerataan guru, ketidaksesuaian kemampuan guru dengan skill yang dibutuhkan semuanya bermuara pada perencanaan awal pengadaan guru. Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia pada umumnya, proses pengadaan guru tanpa dilatarbelakangi analisis konkrit tentang jumlah dan kualifikasi guru yang

dibutuhkan. Penggunaan intuisi nampaknya lebih dominan dibandingkan dengan informasi dan data akurat. Padahal dalam manajemen pendidikan hendaknya data dan informasi dahulu yang dijadikan acuan dalam mengambil kebijakan baru intuisi digunakan untuk melengkapi analisa. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan yaitu melakukan analisis kebijakan perencanaan kebutuhan guru sehingga permasalahan yang ada berkaitan dengan ketidakmerataan pemenuhan kebutuhan guru dapat terpenuhi sesuai dengan data dan informasi yang akurat.

Penelitian Kedua oleh Kejora (2020) dengan judul “Analisis *Supply and Demand* Tenaga Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar”. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi tenaga pendidik di SD N 1 Nagrikidul mengalami *surplus* (kelebihan tenaga pendidik) atau kondisi *non-equilibrium* (ketidakseimbangan *demand* dengan *supply*). Beberapa penyebab kondisi *nonequilibrium* tersebut yaitu kebijakan pemerintah daerah atas sekolah negeri, kebijakan yang belum berbasis riset, kewenangan kepala sekolah, kondisi guru dan pendekatan perencanaan tenaga pendidik. Dalam penelitian yang akan dilakukan memiliki kebaruan yaitu kajian yang dilakukan terkait perencanaan kebutuhan guru sekolah dasar negeri di Kabupaten Pringsewu.

Penelitian ketiga oleh Suryadi (2005) dengan judul “Analisis Kebutuhan Guru untuk Mengantisipasi Dampak Pensiun Guru yang Direkrut selama Pelaksanaan Inpres SD dan Wajib Belajar 6 Tahun”. Hasil penelitian menunjukkan mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 akan terjadi pensiun massal guru PNS SD, kualifikasi pendidikan guru SD dan MI di Indonesia masih perlu ditingkatkan, setidaknya minimal lulusan D2 PGSD. Jumlah guru SD/MI yang pensiun beragam antara satu daerah dengan daerah lainnya. Diprediksi bahwa kebutuhan guru SD/ MI rata-rata lebih dari 100.000 orang setiap tahun diperlukan sebagai pengganti, puncaknya pada tahun 2013. Provinsi Jawa Barat merupakan daerah yang paling banyak membutuhkan guru pengganti sebanyak 314.504 orang. Dalam penelitian yang akan dilakukan memiliki nilai kebaruan terkait analisis perencanaan kebutuhan guru SD Negeri di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, yang mana di wilayah tersebut berdasarkan data yang ada menunjukkan masih mengalami kekurangan guru jika dilihat dari data guru yang pensiun setiap tahunnya. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan membahas secara lebih rinci mengenai upaya yang dilakukan

oleh pemerintah daerah yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu dalam melakukan analisis perencanaan kebutuhan guru guna terpenuhinya kebutuhan guru.

Penelitian keempat oleh Widiarto (2020) dengan judul “Analisis Kebijakan Pengelolaan Guru di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini adalah Keberhasilan dalam pengimplementasian kebijakan pengelolaan guru menjadi sangat penting. Akan tetapi, dalam implementasinya, terdapat sejumlah permasalahan dalam pengelolaan guru nasional yang berpotensi tidak tercapainya tujuan kebijakan yang meliputi hal-hal berikut: 1) Belum terpenuhinya kebutuhan guru secara nasional, 2) Tidak adanya alokasi anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik, 3) masih rendahnya penghasilan guru honorer, 4) beban kerja guru dan 5) sistem rekrutmen, promosi, pengangkatan, dan pemindahtugasan yang kurang objektif, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan masalah-masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai pemenuhan kebutuhan guru di suatu wilayah saja yang mana nilai dari kebaruan ini adalah untuk mengetahui upaya pemerintah daerah yaitu dinas pendidikan dan kebudayaan di kabupaten pringsewu dalam melakukan analisis perencanaan kebutuhan guru sehingga dapat terpenuhinya ketersediaan guru di wilayah tersebut.

Penelitian kelima oleh Isma (2017) dengan judul “Analisis Kebijakan Perencanaan Kebutuhan Guru SMA di Kabupaten Aceh Tengah”. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa: 1) keadaan siswa 5 tahun terakhir 2011/2012 s/d 2015/2016 *enrolment* paling tinggi pada Tahun Ajaran 2014/2015 berjumlah 5.067 orang dan terendah pada tahun 2015/2016 dengan jumlah 4.903 orang, 2) persediaan guru saat ini berdasarkan kurikulum 2013 berjumlah 402 orang, 3) hasil proyeksi menunjukkan kebutuhan guru SMA di Kabupaten Aceh Tengah pada Tahun Ajaran 2017/2018 (558 orang), 2018/2019 (556 orang), 2019/2020 (530 orang), 2020/2021 (554 orang) dan 2021/2022 (606 orang) kebutuhan tersebut sudah termasuk dengan guru yang akan pensiun. Dalam penelitian yang akan dilakukan, terdapat nilai kebaruan dimana peneliti lebih memfokuskan scope penelitian di jenjang pendidikan dasar yaitu Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Hal ini dikarenakan, berdasarkan data observasi yang diperoleh menyatakan bahwa di wilayah tersebut menunjukkan adanya kekurangan pemenuhan kebutuhan guru

khususnya guru SD Negeri sehingga dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti akan melakukan analisis kebijakan perencanaan kebutuhan guru SD Negeri di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dengan melakukan perhitungan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran datanya.

Penelitian keenam oleh Azizah (2023) dengan judul “Analisis Kebutuhan dan Sebaran Guru Geografi SMA/MA Negeri di Padang Pariaman Tahun 2021-2026”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 1) jumlah kebutuhan guru geografi SMA/MA Negeri di Kabupaten Padang Pariaman berjumlah 36 guru sedangkan guru yang ada mencapai 47 guru geografi, sehingga terjadinya kelebihan akan kebutuhan guru geografi sebanyak 11 guru geografi 2) sebaran guru geografi SMA/MA Negeri di Kabupaten Padang Pariaman belum merata yang terjadi di 9 kecamatan karena masih adanya kesenjangan antara guru yang ada dan kebutuhan akan guru tersebut. Dalam penelitian yang akan dilakukan, terdapat nilai kebaruan dimana peneliti lebih memfokuskan scope penelitian di jenjang pendidikan dasar yaitu Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Hal ini dikarenakan, berdasarkan data observasi yang diperoleh menyatakan bahwa di wilayah tersebut menunjukkan adanya kurang pemenuhan kebutuhan guru khususnya guru SD Negeri sehingga dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti akan melakukan analisis kebijakan perencanaan kebutuhan guru SD Negeri di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dengan melakukan perhitungan secara tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenaran datanya.

Penelitian ketujuh oleh Izhati (2023) dengan judul “Analisis Kebijakan Kebutuhan Guru dan Alternatif Kebijakannya pada Jenjang SMA Negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta”. Hasil dari penelitian analisis kebutuhan guru SMA Negeri se-DIY menunjukkan bahwa 8 mata pelajaran memiliki kebutuhan jumlah guru diantaranya adalah: Fisika 35 guru, Biologi 32 guru, Kimia 24 guru, Ekonomi 22 guru, PPKN 13 guru, Matematika 4 guru, Sosiologi dan Geografi 11 guru. Kekurangan jumlah guru terdapat 2 mata pelajaran yaitu; PJOK 4 guru, dan Bahasa Indonesia 1 guru. 1 mata pelajaran yang dapat diatasi dengan sistem mutasi yaitu mata pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa. Alternatif kebijakan pada penelitian ini adalah; 1) Membuat proyeksi guru pensiun, 2) Sekolah mengajukan permintaan formasi guru ke Dinas Pendidikan dengan catatan urgent, 3) Pengajuan formasi

kebutuhan guru ke BKD dilakukan setiap semester pembelajaran, 4) Penataan kembali untuk sekolah yang memiliki data kebutuhan guru, 5) Membuat daftar mutasi guru, 6) Aplikasi SIYAP ditambahkan fitur publikasi data, 7) Monitoring kebijakan kebutuhan guru dilakukan secara berkala, 8) Guru PNS dimutasikan ke Provinsi lain yang membutuhkan kekurangan jumlah guru, 9) Guru non PNS yang termasuk dalam hitungan kelebihan jumlah guru di rumahkan. Dalam penelitian yang akan dilakukan, terdapat nilai kebaruan dimana peneliti lebih memfokuskan scope penelitian di jenjang pendidikan dasar yaitu Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Hal ini dikarenakan, berdasarkan data observasi yang diperoleh menyatakan bahwa di wilayah tersebut menunjukkan masih mengalami kekurangan pemenuhan kebutuhan guru. Oleh karena itu, maka penelitian yang akan dilakukan membahas lebih rinci lagi mengenai analisis kebijakan perencanaan kebutuhan guru SD Negeri di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung sehingga menghasilkan sebuah alternatif kebijakan dalam melakukan upaya pemenuhan kebutuhan guru oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat.

Penelitian kedelapan oleh Wahyudiati (2022) dengan judul “Analisis Perencanaan dan Rekrutmen Guru pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah”. Hasil penelitian menyatakan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah dalam merencanakan dan merekrut tenaga pendidik dengan melakukan evaluasi dan analisis kebutuhan kekurangan guru di tiap-tiap sekolah dengan berpedoman pada kebutuhan guru yang diusulkan oleh para kepala sekolah. Kemudian melakukan koordinasi berupa rapat, pertemuan dan musyawarah bersama dalam rangka mengusulkan perencanaan tenaga pendidik yang diusulkan oleh sekolah. Dalam penelitian yang akan dilakukan memiliki nilai kebaruan dimana peneliti lebih memfokuskan scope penelitian di jenjang pendidikan dasar yaitu Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu merupakan instansi daerah yang memiliki wewenang dalam melakukan perencanaan dan perekrutan guru sesuai dengan kebutuhan guru yang diusulkan di tiap sekolah. Oleh karena itu, peneliti akan membahas lebih dalam mengenai analisis kebijakan perencanaan kebutuhan guru dimana pemangku kebijakan dalam perencanaan kebutuhan guru adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu sehingga dengan dilakukan

penelitian ini peneliti dapat mengetahui secara rinci proses dalam pengambilan alternatif kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat sesuai dengan model analisis kebijakan menurut William N. Dunn.

Penelitian kesembilan oleh Pawero (2021) dengan judul “Arah Baru Perencanaan Pendidikan dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pendidikan”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa arah perencanaan pendidikan harus mengarah kepada kebijakan pendidikan yang mengarahkan manusia bukan hanya cerdas dalam arti menguasai kecerdasan akademik tetapi yang terpenting ialah menjadikan peserta didik mampu menguasai keterampilan ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus menjadi manusia yang berbudaya. Dengan demikian, perencanaan pendidikan menghadapi era informatisasi dan industrialisasi abad 21 haruslah mewujudkan rumusan kebijakan yang menjadikan pendidikan sebagai *educated human being* sekaligus *educated and civilized human being* yaitu pendidikan yang mampu menjadikan masyarakatnya menjadi manusia yang cerdas dan sekaligus beradab. Berdasarkan penelitian tersebut, maka sangatlah penting untuk melakukan perencanaan pendidikan mengenai pemenuhan kebutuhan guru karena guru merupakan aspek penting terhadap berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai analisis kebijakan perencanaan kebutuhan guru yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.

Penelitian kesepuluh oleh Sahnun (2017) dengan judul “Urgensi Perencanaan Pendidikan di Sekolah Dasar”. Hasil penelitian menyatakan bahwa perencanaan memiliki peranan yang amat penting dalam mengelola sebuah institusi atau lembaga, terutama pada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan sebuah pabrik yang akan memproduksi generasi-generasi yang unggul dalam prestasi dan anggun dalam akhlak, apalagi dengan lembaga yang berlabelkan Islam sebagai pandangan dan pedoman dalam membina dan mengembangkan peserta didik. Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa begitu penting peran perencanaan pendidikan dalam pengelolaan sebuah lembaga pendidikan karena bukan hanya menghasilkan barang dan jasa tetapi juga menghasilkan generasi-generasi yang unggul untuk Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, sangat diperlukan sebuah keseimbangan antara ketersediaan guru dengan jumlah peserta

didik yang ada karena ketika ada ketidakmerataan terkait ketersediaan guru maka menimbulkan ketidakefektifan dalam memberikan pendidikan untuk para peserta didik. Sehingga penelitian tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam mengenai analisis perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu guna memenuhi kebutuhan guru di wilayah tersebut.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki nilai kebaruan dengan penelitian terdahulu yakni ditinjau dari model analisis kebijakan yang digunakan untuk menganalisis perencanaan kebutuhan guru yang akan dilakukan di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, dimana model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis kebijakan menurut William N. Dunn. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya, pembahasan yang dilakukan lebih mengarah pada analisis perencanaan kebutuhan guru pada tingkat pendidikan menengah dan kebijakan pengelolaan guru pada satuan pendidikan dasar di Indonesia. Dengan demikian, maka perlu adanya pembaharuan dan penyempurnaan terhadap hasil penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih rinci dan mendalam dengan mengangkat tema yang berjudul, **“ANALISIS KEBIJAKAN PERENCANAAN KEBUTUHAN GURU SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DI KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG.”**

*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*